

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Amancik, Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(4), 71.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Journal of Lex Philosophy (JLP). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- Arry. (2014). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa. In *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* (Issue 72).
<https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/7691/6694>
- Azhari, V. R., Salsabil, I., Kitri, I., Aldaba, R., Pembimbing, D., & Rayhan, A. (n.d.). *Analisis Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Keuangan Negara Pendahuluan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , Pemerintahan desa diatur dalam Un.* 2–14.
- Bait, P. M., & Obe, R. G. A. (2023). Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 146–151. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.469>
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Desa, K., & Indonesia, D. I. (n.d.). *Politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa di indonesia.*
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Developing Villages in Indonesia.*

- Fathurrahman, M. (2024). Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Case Law Journal of Law*, 5(1).
- Febriansyah, P. S., Aromatika, D., & Koeswara, H. (2023). Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. *Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Handayani, S. (2022). *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Volume 2 Nomor 2 Agustus 2022 Halaman 61-73 e STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA*. 2, 61–73. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.26221>
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Haryati, H., Pujiono, P., Nuswantara, D. A., Yanthi, M. D., & Siregar, C. S. (2023). Pendampingan Penyusunan Program Kerja BPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.26740/abi.v4n1.p9-15>
- Hidayat, M. A., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 61–73. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.130>
- Hukum, J. I., Dan, D., & Pemerintahan, A. (2024). *Qanuniya : 1*(2). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.959>
- Idham, I., Nadriana, L., & Sudewi, S. (2022). Memahami Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 53–67. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1501>

- Jopinus Ramli Saragih. (2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 10(1), 132–142. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v10i1.1931>
- Kusdiarti, D. D., & Arzaqi, N. (2024). *Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat*. 2(1), 92–98.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Lambi, M., & Siswani, C. B. (2024). Legal Protection For Consumers In Electronic Transactions. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(1), 243–252. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i1.1018>
- Luhukay, R. S. (2024). Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1804>
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>
- Nia Agustina, Esa Esa, & Mohamad Yusuf. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 201–209. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>
- Nurlita, S. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 4(1), 1167–1186.

<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2976%0Ahttps://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2976/2310>

- Padilah, A. H., Patriani, I., Ritaudin, R., Nazari, N. A., & Apriyani, E. (2025). *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun : Studi Kasus di Kecamatan Sayan , Kabupaten Melawi. June*, 61–70.
- Peraturan. (2019). *Pmk 183/Pmk.05/2019*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Pralampita, T. W. (2024). *Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia*. 5(1).
- Rahadi, F. D. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. *Journal of Law and Economics*, 2(2), 64–71. <https://doi.org/10.56347/jle.v2i2.125>
- Retnowati, E., & Krisharyanto, E. (2018). Problematika Yuridis Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. *Perspektif*, 23(1), 55. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i1.633>
- Rina Amelia, Slamet Triyadi, U. M. (2023). 3 1,2,3. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 656–664.
- Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2024). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(1), 69–97. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.577>
- Sulaiman, A. (2019). Penghantar Ilmu Hukum. *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 129-131.
- Syukri, M., & Sari, I. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat*. 7(2), 85–103.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah*

Wahana Pendidikan, 8(9), 384–399. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7209226>

Tingkat, S., Di, D., Utara, M., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2023). Hubungan Program Prioritas Desa dengan Struktur Ekonomi Lokal: Studi Tingkat Desa di Maluku Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4, 124–141. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.490>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Naskah Asli

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 107/Puu-XXII/2024

Putusannya Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023

BUKU

Hartono, H. (2024). *KONSTITUSI DAN DEMOKRASI REGULATION OF THE VILLAGE HEAD 'S TERM OF SERVICE FROM*. 2161–2169.

Kusriyah, S. (2017). *Ilmu Negara Umum*.

Padilah, A. H., Patriani, I., Ritaudin, R., Nazari, N. A., & Apriyani, E. (2025). *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun : Studi Kasus di Kecamatan Sayan , Kabupaten Melawi. June*, 61–70

Hukum, I. (n.d.). *Istilah hukum populer*.

Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018). [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)

Asiva Noor Rachmayani. (2015b). *HUKUM TATA NEGARA*

Asshidiqie, J. (2011). *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018). [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)

Pemerintah Desa Cipari. (2024). *Kearifan Lokal Desa Cipari: Bagaimana Masyarakat Memainkan Peran Vital*. Diakses dari <https://cipari.desa.id/kearifan-lokal-desa-cipari-bagaimana-masyarakat-memainkan-peran-vital>

Sulaiman, A. (2019). Penghantar Ilmu Hukum. *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 129-131.

Kelsen, H. (2007). Teori Umum Hukum dan Negara. *Judul Asli: General Theory of Law and State*. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media.

Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.